

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAERAH (APBD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA PEKANBARU

Jenny Geondart¹; Faizah Kamilah²; Gusmarila Eka Putri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. D.I. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : faizahkamilah@unilak.ac.id

diterima: 02/05/2023; direvisi: 07/06/2023; diterbitkan: 31/07/2023

Abstract: This study aims to test and analyse the effect of the regional revenue and expenditure budget (APBD) and economic growth on employment in the city of Pekanbaru. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The data used are regional expenditure funds, economic growth and labour (10-year time series data from 2010 - 2019). The results of this study indicate that partially the APBD has no significant effect on labour absorption while economic growth partially has a significant effect on labour absorption. And while simultaneously the APBD and economic growth have an effect on labour absorption

Keywords: *APBD, Economic Growth and Labour Absorption*

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu pembangunan, salah satunya tercipta dengan adanya peluang lapangan pekerjaan yang baru, berkualitas yang artinya dapat mampu memberikan pendapatan yang akan menjamin kehidupan para pekerja secara layak dan nyata. Pertumbuhan ekonomi ini sangat berkaitan dengan faktor produksi, yaitu artinya semakin banyak jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi maka di ikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan kuantitas dan kualitas lapangan kerja tersebut melalui usaha ekonomi padat pekerja.

APBD yaitu gambaran atau acuan yang penting dalam keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan mengalami pengaruh yang positif pada pencipta lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat daerah.

Dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang baru, sebaiknya kegiatan

ekonomi swasta local dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang dalam APBD. Jika anggaran belanja pembangunan pemerintah daerah lebih besar dari pada anggaran pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan seperti ini harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dan jika pemerintah daerah menjalankan fungsi APBD sesuai dengan apa yang telah dikatakan sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi distribusi pendapatan daerah.

Menurut peraturan pemerintah dalam negeri No 37 Tahun 2010 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2011, kriteria belanja daerah dalam APBD terdiri atas 1). belanja rutin (belanja aparatur/belanja tidak langsung) dan 2). belanja pembangunan (belanja publik/ belanja langsung). Belanja rutin adalah belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, contoh : belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, serta belanja perjalanan

dinas. Belanja pembangunan adalah di gunakan untuk mendanai peningkatan kualitas layanan publik, berupa pembangunan prasarana dan sarana publik. Belanja pembangunan dalam analisis belanja pemerintah karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas untuk layanan publik. Strategi pengalokasian belanja pembangunan oleh pemerintah daerah sangat ditentukan pada kebutuhan dan kepentingan daerah tersebut.

Dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia yang mengalami peningkatan pertumbuhan diperoleh dari sekelompok masyarakat golongan ekonomi atas yang dengan sendirinya jatuh kebawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang bagi masyarakat ekonomi bawah yang akan menumbuhkan berbagai kondisi pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi akan terjadi atau tidak sama sekali (Arsyad 2010:12).

Manfaat pertumbuhan ekonomi ini akan dirasakan oleh masyarakat golongan ekonomi atas terlebih dahulu kemudian masyarakat golongan ekonomi rendah mulai memperoleh manfaat pada saat golongan ekonomi atas akan membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah di terima, maka dari itu bahwa ekonomi golongan rendah akan berkurang dalam skala yang sangat kecil jika penduduk ekonomi golongan rendah hanya menerima sedikit manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi (Laksani,2010).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran pendapatan dan belanja daerah dijelaskan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, yang tertuang pada pasal 1 angka 14 yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. “ Tahun Anggaran APBD meliputi Masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember “.

Pengertian menurut para ahli yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diungkapkan oleh Halim (2012:10) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Badrudin (2012; 27) dalam bukunya ekonomika otonomi daerah yaitu APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Unsur-Unsur APBD Menurut Halim (2012;22) adalah: (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut dan adanya biaya – biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran

yang dilakukan, (3) Jenis dan kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, (4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Dalam Pertumbuhan Ekonomi sebagai perubahan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya. Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika hasil akhir dari kegiatan ekonomi sektoral di peroleh nilai produksi berupa produk akhir atau nilai tambah secara nasional bertambah besar dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Maka dari itu bila terjadi Pertumbuhan Ekonomi akan dapat diketahui bahwa jika barang atau produk yang dihasilkan yaitu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari suatu negara bertambah banyak juga disertai dengan peningkatan kualitas produk yang semakin baik.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh prof Rahardjo Adisasmita (2014:91), dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut: (1) Ketidakseimbangan pendapatan; yaitu dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil 80% populasi terbawah akan menerima 80% dari total pendapatan sedangkan 20% populasi teratas menerima 20% total pendapatan, (2) Perubahan struktur perekonomian; Dalam masyarakat yang maju pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian dimana

terjadi kecenderungan bahwa kontribusi atau peran sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat, (3) Pertumbuhan kesempatan kerja; Masalah ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana misalnya jalan.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro 2012: 89).

Dalam banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro 2015;46).

Penduduk yang berkerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

Adapun indikator dari penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut: (1) Perubahan Upah Minimum ; Upah minimum yang berubah-ubah setiap tahunnya dapat mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena apabila tingkat upah naik maka perusahaan akan lebih memilih untuk tidak menambah jumlah tenaga kerja lalu menaikkan upah kepada pekerja yang sudah ada. (2) Laju

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; Banyak nya peluang atau penyerapan tenaga kerja diantara dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di suatu provinsi. Apabila tingkat PDRB meningkat maka semakin banyak juga tenaga kerja yang terserap. Karena kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan perekonomian di suatu daerah atau provinsi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut juliandi dkk(2013;89) bahwa data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi dari BPS dari tahun 2010 – 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh terhadap tenaga kerja dapat diterima dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APBD tidak berpengaruh terhadap Tenaga Kerja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil signifikansi nya. Maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara APBD terhadap penyerapan tenaga kerja.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kebijakan utama bagi pemerintahan daerah. Maka anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan, otoritas pengeluaran di masa – masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standar evaluasi kinerja alat bantu untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai jenis unit kerja. (Mardiasmo 2012 ;103)

Namun pada akhirnya setiap pengeluaran pemerintah belum tentu menjadi alat ukur yang sangat menentukan untuk mempengaruhi besar nya penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru. Faktor lain yang mempengaruhi adanya penyerapan tenaga kerja yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk APBD yang tercermin dari belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah, pengeluaran daerah, inestasi, dan sektor – sektor rkonomi yan masih potensial agar lebih dioptimalkan pemerintah daerah agar menciptakan produktifitas sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti, dan Muhammad safri (2018) Pengaruh PDRB upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jambi. Yang menyatakan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh signifikan dan sedang kan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laily Chodariyanti (2016) yang menemukan bahwa APBD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pemahaman bahwa peningkatan atau penurunan tingkat pengeluaran APBD tidak atau belum tentu terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kesimpulan yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tenaga kerja” dapat diterima dan

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tenaga Kerja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dan signifikan nya. Maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara APBD terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.(effendi,2019;201)

Dalam Pertumbuhan Ekonomi sebagai perubahan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya. Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika hasil akhir dari kegiatan ekonomi sektoral di peroleh nilai produksi berupa produk akhir atau nilai tambah secara nasional bertambah besar dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Maka dari itu bila terjadi Pertumbuhan Ekonomi akan dapat diketahui bahwa jika barang atau produk yang dihasilkan yaitu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari suatu negara bertambah banyak juga disertai dengan peningkatan kualitas produk yang semakin baik. Yang artinya jika pertumbuhan ekonomi nya meningkat maka pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja juga akan semakin meningkat. (effendi,2019;201).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh alisman (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pemahaman bila terjadi Pertumbuhan Ekonomi akan dapat diketahui bahwa jika barang atau produk yang dihasilkan akan semakin bertambah maka dalam penyerapan tenaga kerja uga sangat kan berpengaruh

KESIMPULAN DAN SARAN

Variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru. Artinya setiap pengeluaran pemerintah belum tentu menjadi alat ukur yang sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru.

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan dari analisis data bahwa Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika hasil akhir dari kegiatan ekonomi sektoral di peroleh nilai produksi berupa produk akhir atau nilai tambah secara nasional bertambah besar dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya.

Hasil uji f menunjukan bahwa kedua variabel yang dimasukan dalam penelitian ini yaitu APBD dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota pekanbaru.

Bagi pemerintah daerah yang selama ini telah mengupayakan kinerja pengeluaran dan perekonomiannya diharapkan lebih mendorong dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan di setiap sektor- sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan dan perusahaan daerah.

Pemerintah daerah perlu mengatasi masalah pengupahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha. Dalam hal ini pengupahan tidak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan upah minimum, namun juga dapat dilakukan berdasarkan produktivitas dari pekerja sehingga baik pengusaha maupun kaum buruh ataupun pekerja mendapatkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Arniati, dkk, 2010, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik

- Penganggaran Perencanaan dan Informasi
Jurnal Publikasi, Papua,
Universitas Yapis.
- Arsyad, Lincolin, 2010, Ekonomi
Pembangunan, Ed 5, Yogyakarta,
UPP STIM YKPN
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012,
Pengelolaan Keuangan Daerah:
Seri Bunga Rampai Manajemen
Keuangan Daerah Edisi 3,
Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN.
- Badrudin, Rudy, 2012, Ekonomika
otonomi daerah, Cetakan I,
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghazali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program
SPSS, Semarang, Universitas
Diponegoro.
- Ghozali, I. 2012. Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program
SPSS. Edisi Enam. Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Semarang.
- Ghozali, Imam, Arifin Subeni. 2012.
Pokok – pokok akuntansi
pemerintahan. Edisi 4. Penerbit
BPFE : Yogyakarta
- Jhingan, M, L, 2012, Ekonomi
Pembangunan dan Perencanaan,
Jakarta : Rajawali Press.
- Laily Chodariyanti, 2016, Pengaruh
Alokasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (APBD)
Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja Di Kabupaten Jember,
Jurnal EKBIS, Universitas Islam
Lamongan
- Laksani, Chichi Shintia, 2010, Analisis
Pro-Poor Growth di Indonesia
melalui Identifikasi Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi terhadap
KetimpanganPendapatan dan
Kemiskinan, Magiste., FE, UI
- Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun
2011, Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
- Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia
Dalam Perspektif Pembangunan,
Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2014 , Hal. 71
- Murti Sumarni & Jhon Suprihanto,
Pengantar Bisnis Dasar – Dasar
Ekonomi Perusahaan,
(Yogyakarta: Liberty,2014),Hal. 5.
- N. Gregory Mankiw, Makroekonomi,
(Jakarta: Erlangga, 2009), Hal.213.
- Nur Feriyanto, Ekonomi Sumber Daya
Manusia Dalam Perspektif
Indonesia (Yogyakarta: UU
STIM YKPM, 2014) hal. 6.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 37
Tahun 2010, Tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2011
- Sudiono Sukirno, Mikroekonomi Teori
Pengantar, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013) Hal.
18.
- Sientri Pristina, Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Inflasi Dan Belanja
Daerah Pengaruhnya Terhadap
Kesempatan Kerja Di Sulawesi
Utara, Jurnal EMBA, Universitas
Sam Ratulangi Manado.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C.
2011, “Pembangunan Ekonomi”.
Edisi Kesembilan, Jakarta,
Erlangga.
- Zulfanetti, Dkk, 2018, Pengaruh PDRB,
Upah Minimum Provinsi Dan
Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja Di
Provinsi Jambi, Jurnal Publikasi,
Universitas Jambi
- Badan Pusat Statistik. (2011). Pekanbaru
Dalam Angka 2010-2022